



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA BITUNG
MENURUT PENGELUARAN
(Gross Regional Domestic Product of Bitung City by Expenditure)

2014-2018





PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA BITUNG
MENURUT PENGELUARAN
(Gross Regional Domestic Product of Bitung City by Expenditure)

2014-2018

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA BITUNG
MENURUT PENGELUARAN 2014-2018**

ISSN : 2654-8836
Nomor Publikasi : 71720.1904
Katalog BPS : 9302020.7172

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah halaman : xii + 62 halaman

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit/ *Cover*:
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :
©Badan Pusat Statistik Kota Bitung

Dicetak Oleh :
CV. Bahu Bahtera Indah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Disamping itu, data ini juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity money*), pendalaman sector keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kota Bitung sehingga memungkinkan terbitnya buku ini. Ucapan yang sama disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini.

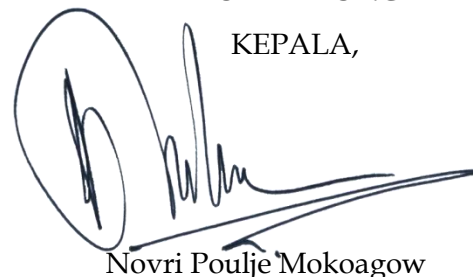
Semoga publikasi ini bermanfaat.

Bitung, Agustus 2019

BADAN PUSAT STATISTIK

KOTA BITUNG

KEPALA,



Novri Poulje Mokoagow

<https://bitungkota.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	5
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	11
2.1 Pengeluaran Konsumsi akhir Rumah Tangga (PK-RT).....	13
2.2 Pengeluaran Konsumsi akhir Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT).....	15
2.3 Pengeluaran Konsumsi akhir Pemerintah (PK-P).....	17
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	19
2.5 Perubahan Inventori (PI).....	21
2.6 Ekspor - Impor.....	24
BAB III TINJAUAN EKONOMI KOTA BITUNG.....	25
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran.....	27
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran.....	29
3.2.1 Konsumsi akhir Rumah Tangga.....	30
3.2.2 Konsumsi akhir LNPRT.....	31
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah.....	32
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	34
3.2.5 Perubahan Inventori.....	34
3.2.6 Ekspor Barang dan Jasa.....	35
3.2.7 Impor Barang dan Jasa.....	36

	Halaman
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KOTA BITUNG.....	37
4.1 PDRB (Nominal).....	39
4.2 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah tangga Terhadap Ekspor.....	40
4.3 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah tangga Terhadap PMTB.....	41
4.4 Proporsi Pengeluaran Konsumsi akhir Terhadap PDRB.....	41
4.5 Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB.....	43
4.6 Perbandingan PDRB Terhadap Impor.....	43
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan.....	44
4.8 Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>).....	45
4.9 <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	46
BAB V PENUTUP.....	49
LAMPIRAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bitung, 2014-2018.....	28
Tabel 2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Bitung, 2014-2018.....	30
Tabel 3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT Kota Bitung, 2014-2018.....	32
Tabel 4. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Bitung, 2014-2018.....	33
Tabel 5. Perkembangan PMTB Kota Bitung, 2014-2018.....	34
Tabel 6. Perkembangan Perubahan Inventori Kota Bitung, 2014-2018....	35
Tabel 7. Perkembangan Ekspor Kota Bitung, 2014-2018	35
Tabel 8. Perkembangan Impor Kota Bitung, 2014-2018.....	36
Tabel 9. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Bitung, 2014-2018	39
Tabel 10. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2014-2018.....	40
Tabel 11. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2014-2018.....	41
Tabel 12. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Bitung, 2014-2018.....	42
Tabel 13. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2014-2018	43
Tabel 14. Rasio PDRB terhadap Impor (ADHB), 2014-2018.....	44
Tabel 15. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Bitung, 2014-2018.....	45
Tabel 16. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kota Bitung, 2014-2018..	46
Tabel 17. <i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kota Bitung, 2014-2018.....	47

<https://bitungkota.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bitung, 2014-2018.....	27
Grafik 1 Laju pertumbuhan PDRB, Konsumsi Akhir Rumah Tangga, PMTB, Ekspor dan Impor Kota Bitung, 2014-2018.....	29

<https://bitungkota.bps.go.id>

<https://bitungkota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bitung, 2014-2018.....	55
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bitung, 2014-2018.....	55
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bitung, 2014-2018.....	56
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bitung 2014-2018.....	56
Lampiran 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kota Bitung, 2014-2018.....	57
Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kota Bitung, 2014-2018.....	57

<https://bitungkota.bps.go.id>

1

PENDAHULUAN

<https://bitungkolaborasi.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
 - Disebut sebagai pendekatan “riil”
 - Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan $GFCF$ serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB

dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.

- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda *FISIM* (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge* (*IBSC*).

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

<https://bitungkota.bps.go.id>

<https://bitungkota.bps.go.id>

2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://bitu.kontribus-go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON-PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\begin{aligned} \text{PK-P atas dasar harga Berlaku} &= \text{Output} - \\ &\quad \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ &\quad \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ &\quad \text{Output Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-deflate PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah

barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan

- bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \frac{\text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)}}{\text{Harga per unit}} \times$$

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB (t-1)}}{\text{IHPB rata-rata (t)}}$$

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

3

**TINJAUAN EKONOMI
KOTA BITUNG**

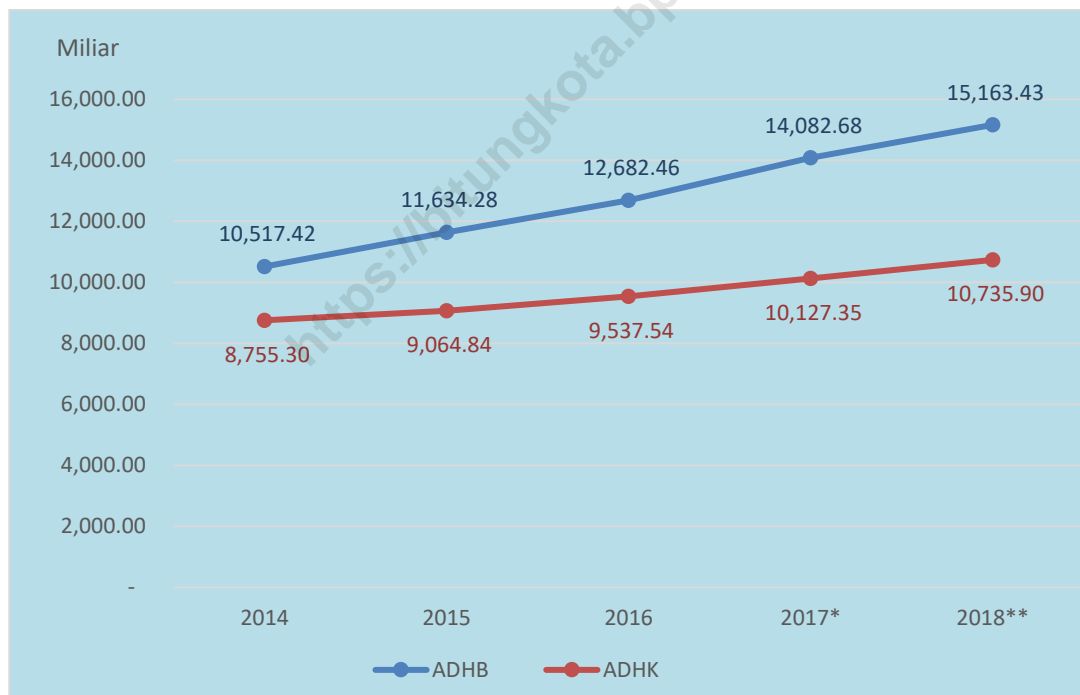
<https://bitung.kotabps.go.id>

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Kondisi Perekonomian Kota Bitung terus Membaik dari Tahun ke tahun. Hal ini terlihat pada PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan total PDRB.

Nilai PDRB Kota Bitung (ADHB) selama periode 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bitung sebesar 10.517,42 miliar rupiah, meningkat menjadi 15.163,43 miliar di tahun 2018. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume, serta terjadinya peristiwa yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pada periode tersebut.

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bitung, 2014-2018



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). Selama periode 2014 sampai dengan 2018

nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kota Bitung meningkat, yakni sebesar 8.755,30 miliar dan meningkat menjadi 10.735,90 miliar rupiah di tahun 2018.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Tabel 1. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bitung, 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	35,94	39,26	38,10	38,14	38,49
2. Konsumsi LNPRT	1,15	1,14	1,15	1,15	1,22
3. Konsumsi Pemerintah	9,49	10,19	9,75	9,87	10,36
4. PMTB	25,17	27,07	27,16	27,16	28,22
5. Perubahan Inventori	0,15	0,11	0,05	0,03	0,02
6. Ekspor	105,00	90,30	88,87	89,10	89,35
7. Impor	76,89	68,07	65,09	65,45	67,67
Total PDRB	100	100	100	100	100

* Angka Sementara

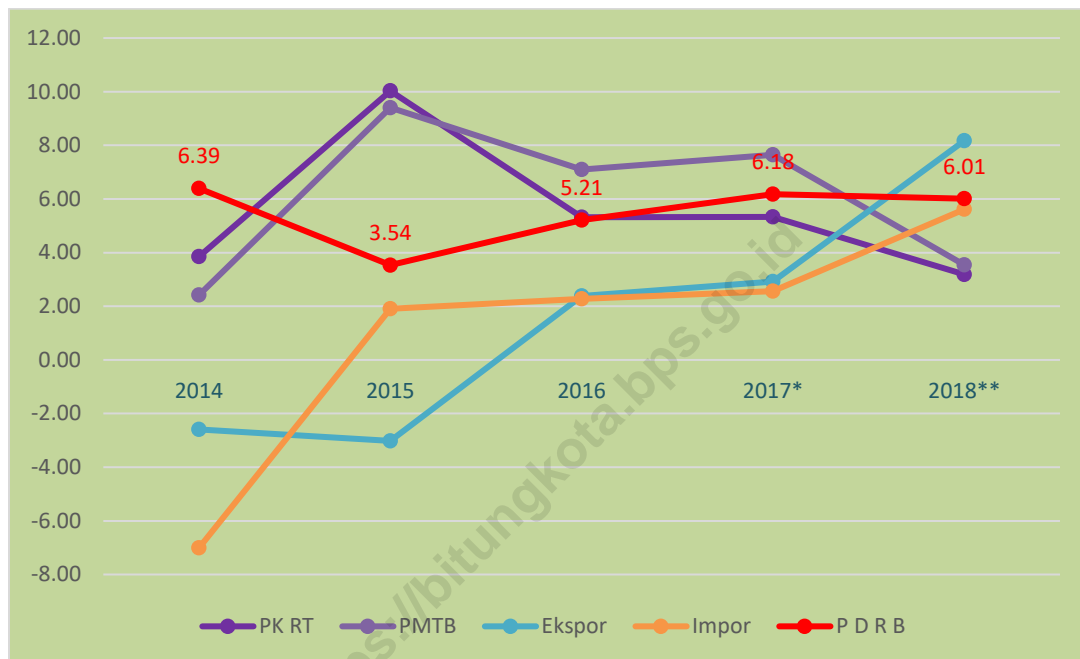
** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa selama periode tahun 2014-2018, berkisar 35-40 persen produk yang dikonsumsi di wilayah domestik, digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. PMTB yang menjadi gambaran investasi fisik di Kota Bitung menduduki urutan kedua, di kisaran 25-29 persen. Ekspor juga mempunyai peran yang besar, produk Kota Bitung mampu menembus pasar luar daerah maupun internasional. Besaran nilai ekspor mencapai 89,35 persen terhadap nilai PDRB. Net ekspor antar daerah positif menunjukkan kondisi surplus, yaitu nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan nilai ekspornya. Hal ini berarti bahwa Kota Bitung mempunyai andil yang besar sebagai pemasok produk barang dan jasa luar daerah.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Bitung dari tahun 2014-2018 secara rata-rata mencapai 3,5-6,5 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,39 persen (2014); 3,54 persen (2015); 5,21 persen (2016); 6,18 persen (2017) dan 6,01 persen di tahun 2018.

Dilihat menurut komponennya, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2015b dengan nilai pertumbuhan masing masing sebesar 10,03 persen dan 9,40 persen. Untuk komponen ekspor dan impor, pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu berturut turut sebesar 8,17 persen dan 5,61 persen

Grafik 2. Laju pertumbuhan PDRB, Konsumsi Akhir Rumah Tangga, PMTB, Ekspor dan Impor Kota Bitung, 2014-2018



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Bitung untuk periode 2014 sampai dengan 2018.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Bitung, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Bitung maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Data menunjukkan bahwa pada periode tahun 2014 - 2018 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga selalu mengalami di atas 3 persen. Bahan di tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 10,03 persen. Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Bitung, 2014-2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi rumah Tangga (miliar rupiah)					
ADHB	3.779,53	4.567,14	4.831,49	5.371,25	5.836,79
ADHK 2010	3.376,64	3.715,24	3.912,83	4.121,22	4.252,57
Proporsi terhadap PDRB	35,94	39,26	38,10	38,14	38,49
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/ tahun (juta Rp)					
ADHB	76,41	90,76	95,44	103,36	110,60
ADHK 2010	68,27	73,83	77,30	79,30	80,58
Rata-rata konsumsi per kapita per tahun (juta Rp)					
ADHB	18,69	22,21	23,12	25,29	27,06
ADHK 2010	16,70	18,06	18,72	19,40	19,71
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT	3,85	10,03	5,32	5,33	3,19
b. Per RT	2,10	8,15	4,69	2,60	1,61
c. Per kapita	2,10	8,17	3,65	3,63	1,61
Jumlah RT (unit)	49.462	50.320	50.621	51.968	52.776
Jumlah penduduk (org)	202.204	205.675	208.995	212.409	215.711

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2013-2018 berada pada kisaran 35 sampai 40 persen. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 39,26 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 35,94 persen.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Pada tahun 2014, secara umum setiap rumah tangga di Kota Bitung menghabiskan dana sekitar 71,41 juta rupiah setahun, untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun non makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 90,76 juta rupiah (2015); 95,44 juta rupiah (2016), dan menjadi 103,36 juta rupiah (2017) dan 110,60 juta rupiah di tahun 2018.

Sementara itu, pada perkiraan atas dasar harga Konstan 2010, rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh di kisaran 2-8 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2015, yakni sebesar 8,15 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kota Bitung meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Rata rata konsumsi perkapita di tahun 2014 sebesar 18,69 juta rupiah dan terus meningkat sehingga di tahun 2018 menjadi 27,06 juta rupiah.

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Peranan pengeluaran konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data menunjukkan proporsi pengeluaran akhir LNPRT terhadap PDRB periode tahun 2014 sampai dengan 2018 berada pada kisaran 1,14 sampai 1,22 persen.

Konsumsi akhir LNPRT baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010, selama periode tahun 2014-2018, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan konsumsi LNPRT juga selalu positif diaman pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2015 sebesar 0,20 persen dan tertinggi sebesar 7,23 persen di tahun 2018.

Dilihat berdasarkan nilainya, ditahun 2014, total konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku sebesar 121,46 miliar dan meningkat menjadi 184,96 miliar rupiah di tahun 2018.

Tabel 3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT Kota Bitung, 2014-2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar rupiah)	121,46	132,71	145,54	162,17	184,96
b. ADHK 2010 (Miliar rupiah)	105,16	105,37	107,43	110,92	118,94
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,15	1,14	1,15	1,15	1,22
Pertumbuhan	2,32	0,20	1,96	3,25	7,23

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Pada tahun 2014 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga Berlaku sebesar 997,58 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2018 nilainya mencapai 1.571,53 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan di masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2014 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 4,93 juta rupiah, terus meningkat dan mencapai 7,29 juta rupiah pada tahun 2018.

Tabel 4. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Bitung, 2014-2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (miliar rupiah)					
ADHB	997,58	1.185,13	1.236,93	1.389,83	1.571,53
ADHK 2010	801,91	882,10	902,48	965,72	1.016,07
Proporsi terhadap PDRB	9,49	10,19	9,75	9,87	10,36
Konsumsi Pemerintah per kapita per tahun (juta Rp)					
ADHB	4,93	5,76	5,92	6,54	7,29
ADHK 2010	3,97	4,29	4,32	4,55	4,71
Konsumsi Pemerintah per Pegawai Pemerintah (juta Rp)					
ADHB	253,97	301,71	329,94	436,23	504,99
ADHK 2010	204,15	224,57	240,73	303,11	326,50
Pertumbuhan					
Total konsumsi Pemerintah	6,10	10,00	2,31	7,01	5,21
Konsumsi per kapita	4,31	8,14	0,69	5,29	3,60
Konsumsi per pegawai	6,10	10,00	7,20	25,92	7,72
Jumlah PNS (org)	3.928	3.928	3.749	3.186	3.112
Jumlah penduduk (org)	202.204	205.675	208.995	212.409	215.711

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2014 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah sebesar 253,97 juta rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya dan menjadi 504,99 juta rupiah di tahun 2018. Dilihat dari sisi pertumbuhannya, total konsumsi pemerintah, konsumsi pemerintah per kapita dan konsumsi pemerintah per pegawai selalu mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Total konsumsi pemerintah dan konsumsi pemerintah perkapita mengalami pertumbuhan tertinggi ditahun 2015, dengan nilai masing masing 10,00 persen dan 8,14 persen. Sedangkan pertumbuhan pengeluaran pemerintah per pegawai tertinggi ditahun 2017 sebesar 25,92 persen, hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah pegawai negeri sipil di kota bitung di tahun tersebut. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Secara total, nilai PMTB selama periode 2014-2018 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, PMTB Kota Bitung tercatat senilai 2.646,78 miliar rupiah, meningkat menjadi 4.278,73 milyar rupiah di tahun 2018. Proporsi PMTB terhadap PDRB memiliki tren yang meningkat, dimana dari tahun 2014 sebesar 25,17 persen kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 28,22 persen. Pertumbuhan PMTB Kota Bitung selama 2014 sampai dengan 2018 juga selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif dimana pertumbuhan tertinggi terjadi ditahun 2015 sebesar 9,40 persen, sedangkan di tahun 2018 hanya sebesar 3,54 persen.

Tabel 5. Perkembangan PMTB Kota Bitung, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai PMTB					
a. ADHB (Miliar rupiah)	2.646,78	3.149,84	3.444,89	3.825,30	4.278,73
b. ADHK 2010 (Miliar rupiah)	2.859,38	3.128,28	3.350,48	3.606,63	3.734,29
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	25,17	27,07	27,16	27,16	28,22
Pertumbuhan	2,42	9,40	7,10	7,65	3,54

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif). Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna.

Dilihat atas dasar harga Berlaku, di tahun 2014 perubahan inventori tercatat sebesar 16,19 miliar rupiah dan memiliki tren menurun setiap tahun dan menjadi sebesar 2,48 miliar di tahun 2018. Proporsi komponen ini terhadap total PDRB juga sangat kecil, di bawah 0,2 persen.

Tabel 6. Perkembangan Perubahan Inventori Kota Bitung, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar rupiah)	16,19	12,98	6,61	3,55	2,48
b. ADHK 2010 (Miliar rupiah)	10,70	13,32	7,01	3,75	2,56
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,15	0,11	0,05	0,03	0,02

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 7. Perkembangan Ekspor Kota Bitung, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar rupiah)	11.042,98	10.505,84	11.271,43	12.547,04	13.549,28
b. ADHK 2010 (Miliar rupiah)	8.349,26	8.097,22	8.290,65	8.532,81	9.230,19
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	105,00	90,30	88,87	89,10	89,35
Pertumbuhan	-2,60	-3,02	2,39	2,92	8,17

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara total, nilai ekspor menurut ADHB selama periode 2014-2018 menunjukkan penurunan di 2015, kemudian meningkat di tahun 2016-2018. Pada tahun 2014, ekspor Kota Bitung tercatat senilai 11.042,98 miliar rupiah, meskipun terjadi penurunan di tahun 2015 tetapi di tahun 2018 meningkat menjadi 13.549,28 milyar rupiah.

Proporsi ekspor terhadap PDRB berfluktuatif, dimana dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, kemudian mengalami sedikit kenaikan ditahun 2017 dan

2018. Di tahun 2018 proporsi impor seberas 89,35 persen. Di sisi lain, secara riil nilai impor mengalami penurunan yang besar di 2014 dan 2015 kemudian ditahun tahun selanjutnya selalu meningkat, pertumbuhan ditahun 2018 sebesar 8,17 persen.

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kota Bitung terhadap produk dari wilayah lain.

Data menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Kota Bitung pada periode tahun 2014-2018 atas dasar harga Berlaku cenderung meningkat, meskipun di tahun 2015 mengalami penurunan. Di tahun 2014 nilai impor senilai 8.087 milyar rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 10.260 milyar rupiah di tahun 2018. Sedangkan dilihat atas dasar harga konstan, nilai Impor terus meningkat selama periode 2014 sampai dengan 2018.

Tabel 8. Perkembangan Impor Kota Bitung, 2014-2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar rupiah)	8.087,10	7.919,36	8.254,43	9.216,46	10.260,34
b. ADHK 2010 (Miliar rupiah)	6.747,74	6.876,68	7.033,34	7.213,69	7.618,73
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	76,89	68,07	65,09	65,45	67,67
Pertumbuhan	-7,01	1,91	2,28	2,56	5,61

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Proporsi impor terhadap PDRB berfluktuatif, dimana dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, kemudian mengalami sedikit kenaikan ditahun 2017 dan 2018. Di tahun 2018 proporsi impor seberas 67,67 persen. Di sisi lain, secara riil nilai impor mengalami penurunan yang besar di 2014 sebesar 7,01 persen kemudian ditahun tahun selanjutnya selalu meningkat, pertumbuhan ditahun 2018 sebesar 5,61 persen.

4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KOTA BITUNG

<https://bitung.konwars.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Dari *series* data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita.

Tabel 9. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Bitung, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rupiah</i>)					
- ADHB	10.517,42	11.634,28	12.682,46	14.082,68	15.163,43
- ADHK 2010	8.755,30	9.064,84	9.537,54	10.127,35	10.735,90
PDRB per kapita (<i>Juta Rupiah</i>)					
- ADHB	52,01	56,57	60,68	66,3	70,3
- ADHK 2010	43,30	44,07	45,64	47,68	49,77
Pertumbuhan					
PDRB per kapita ADHK 2010	4,6	1,79	3,54	4,48	4,39
Jumlah penduduk (<i>orang</i>)	202.204	205.675	208.995	212.409	215.711
Pertumbuhan (persen)	1,80	1,78	1,75	1,74	1,71

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB per kapita Kota Bitung atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 52,01 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 70,30 juta rupiah. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa secara makro kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Bitung dari tahun ke tahun semakin membaik meskipun masih perlu mempertimbangkan juga faktor inflasi. Selama lima tahun terakhir ini, PDRB Perkapita mengalami peningkatan yang cukup berarti. PDRB per kapita Kota Bitung atas

dasar harga konstan di tahun 2014 sebesar 43,30 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 49,77 juta rupiah di tahun 2018.

Jumlah penduduk meningkat rata-rata pada kisaran 1,7 persen setiap tahunnya. Sementara itu pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 3,5 hingga 4,5 persen, walaupun di tahun 2015 ada terjadi perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian pertumbuhan penduduk Kota Bitung selalu diikuti dengan peningkatan kualitas perekonomian, meskipun peningkatan ekonomi tersebut belum dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

4.2 PERBANDINGAN PDRB PENGELUARAN UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang cukup dominan dalam penggunaan PDRB Kota Bitung (sekitar 38 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kota Bitung sebagian digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 10. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2014-2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB) (Miliar rupiah)	3.779,53	4.567,14	4.831,49	5.371,25	5.836,79
Total Ekspor (ADHB) Miliar Rupiah	11.042,98	10.505,84	11.271,43	12.547,04	13.549,28
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Ekspor	0,34	0,43	0,43	0,43	0,43

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2014, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sekirat 0,34 kali dari yang diekspor. Sementara itu tahun 2018, konsumsi rumah tangga menjadi 0,43 kali dibandingkan ekspor. Nilai perbandingan yang lebih kecil dari satu ini menunjukkan bahwa dari total penyediaan (suplly domestik), yang diserap untuk konsumsi akhir rumah tangga masih lebih kecil dibandingkan untuk yang diekspor ke luar wilayah. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (supply) domestik digunakan

untuk ekspor. Rasipo selama 2015 sampai 2018 stabil di 0,43 yang menunjukkan antara konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor memiliki pola yang sama.

4.3 PERBANDINGAN PDRB PENGELUARAN UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Nilai PMTB diukur dengan total nilai perolehan dikurangi pelepasan aset tetap milik produsen selama periode neraca, tambah pengeluaran atas jasa tertentu yang menambah nilai aset tak diproduksi.

Tabel 11. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2014-2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB) (Miliar rupiah)	3.779,53	4.567,14	4.831,49	5.371,25	5.836,79
Total PMTB (ADHB) Miliar Rupiah	2.646,78	3.149,84	3.444,89	3.825,30	4.278,73
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	1,43	1,45	1,40	1,40	1,36

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB dalam kurun 2014-2018 relatif menurun dengan rata-rata rasio 1,41. Hal ini berarti bahwa konsumsi rumah tangga masih lebih besar dibandingkan investasi aset tetap sebesar 1,41 kali lipat. Nilai investasi maupun nilai konsumsi rumah tangga memiliki pola yang sama-sama meningkat.

4.4 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB dalam kurun 2014-2018 relatif stabil dengan rata-rata 1,41. Hal ini berarti bahwa konsumsi rumah tangga masih lebih besar dibandingkan investasi aset tetap sebesar 1,41 kali lipat. Nilai investasi maupun nilai konsumsi rumah tangga memiliki pola yang sama-sama meningkat. pada tahun tahun 2015 merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 1,45, setelah itu mengalami kecenderungan yang menurun. Hal tersebut mengindikasikan hal yang positif bahwa kenaikan konsumsi RT tidak sebesar kenaikan investasi yang dilakukan. Sehingga mengindikasikan bahwa pengeluaran di Korta Bitung menuju kearah yang lebih produktif.

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir. Aktivitas konsumsi akhir ini tidak termasuk pengeluaran untuk aset tetap dalam bentuk tempat tinggal atau barang berharga karena pengeluaran dengan jenis ini digolongkan kedalam Pembentukan Modal Tetap Bruto. Sementara PDRB (ADHB) menunjukkan seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh residen dalam satu wilayah pada suatu periode. Perbandingan konsumsi akhir terhadap PDRB menunjukkan proporsi aktivitas konsumsi pada suatu wilayah.

Tabel 12. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Bitung, 2014-2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) Miliar Rupiah					
a. Rumah tangga	3.779,53	4.567,14	4.831,49	5.371,25	5.836,79
b. LNPRT	121,46	132,71	145,54	162,17	184,96
c. Pemerintah	997,58	1.185,13	1.236,93	1.389,83	1.571,53
J u m l a h	4.898,57	5.884,98	6.213,95	6.923,25	7.593,28
PDRB (ADHB) miliar Rupiah	10.517,42	11.634,28	12.682,46	14.082,68	15.163,43
Proporsi	46,58	50,58	49,00	49,16	50,08

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas didapat gambaran proporsi total konsumsi akhir dari rumah tangga, LNPRT dan pemerintah terhadap PDRB Kota Bitung tahun 2014 -2018 rata-rata sebesar 49,09 persen. Hal ini berarti bahwa total penggunaan konsumsi akhir hampir mencapai setengah dari PDRB yang tercipta. Selama periode 2014 sampai 2018, proporsi pengeluaran akhir terhadap PDRB memiliki tren berfluktuatif namun cenderung meningkat. Perkembangan nilai konsumsi akhir setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sebagian besar konsumsi akhir digunakan untuk konsumsi rumah tangga kemudian diikuti oleh konsumsi pemerintah dan terakhir konsumsi LNPRT.. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan PDRB yang digunakan untuk PMTB dan ekspor masih belum optimal, untuk itu diperlukan terobosan untuk meningkatkan investasi dan ekspor Kota Bitung guna meningkatkan aktivitas ekonomi, terutama sector-sektor yang menjadi unggulan di Kota Bitung.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah sendiri, tetapi diperdagangkan baik ke luar daerah ataupun ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Apabila rasio ekspor lebih tinggi dari PMTB memberi gambaran bahwa produk yang dihasilkan banyak digunakan untuk kegiatan ekspor dibandingkan digunakan untuk investasi demikian sebaliknya jika rasionya lebih kecil dari 1 (satu) maka memberi gambaran bahwa hasil produk wilayah banyak digunakan untuk investasi dibandingkan untuk ekspor.

Tabel 13. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor (ADHB) (Miliar rupiah)	11.042,98	10.505,84	11.271,43	12.547,04	13.549,28
Total PMTB (ADHB) Miliar Rupiah	2.646,78	3.149,84	3.444,89	3.825,30	4.278,73
Rasio Ekspor terhadap PMTB	4,17	3,34	3,27	3,28	3,17

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Kondisi tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa rasio ekspor terhadap PMTB selama tahun mempunyai nilai rata-rata 3,45, ini menunjukkan bahwa produk Kota Bitung banyak digunakan untuk ekspor dibandingkan dengan investasi fisik, meskipun terlihat bahwa selama 2014-2018 rasionya mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini menunjukkan aktivitas ekspor Kota Bitung lebih tinggi dibandingkan untuk investasi.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain maupun negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 14. Rasio PDRB terhadap Impor (ADHB), 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar rupiah)	10.517,42	11.634,28	12.682,46	14.082,68	15.163,43
Total Impor (ADHB) Miliar Rupiah	8.087,10	7.919,36	8.254,43	9.216,46	10.260,34
Rasio PDRB terhadap Impor	1,30	1,47	1,54	1,53	1,48

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2014-2018 menunjukkan kecenderungan yang berfluktuatif, dimana pada tahun 2014-2016 mengalami peningkatan, kemudian di tahun 2017 dan 2018 menurun.. Secara rata-rata selama lima tahun terakhir rasio PDRB terhadap aktivitas impor di Kota Bitung sebesar 1,46 dimana pada tahun 2014 rasio masih pada posisi 1,30 persen kemudian naik menjadi 1,54 di tahun 2016 dan kemudian berturut-turut mengalami penurunan sehingga posisi di tahun 2018 yaitu 1,48.

Penurunan rasio ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan wilayah terhadap produk impor sebaliknya jika rasio meningkat maka ketergantungan terhadap impor menurun. Apabila diamati dari tendensi rasio produk domestik terhadap impor yang semakin menurun di dua tahun terakhir, maka lambat laun akan berdampak terhadap aktivitas produksi domestik sehingga pemerintah harus segera merumuskan kebijakan yang mendukung sektor produktif untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Kota Bitung.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah terhadap produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (supply) dengan total permintaan akhir (demand).

Berdasarkan seri data yang ada, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar (luar negeri dan wilayah lain), sekitar 39-44 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 56-61 persen dari hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari Rp 18,60 triliun di tahun 2014 menjadi sebesar Rp 25,42 triliun di tahun 2018.

Tabel 15. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Bitung, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan PDRB (ADHB)					
(Miliar rupiah)	10.517,42	11.634,28	12.682,46	14.082,68	15.163,43
%	56,53	59,50	60,57	60,44	59,64
Total Impor (ADHB)					
Miliar Rupiah	8.087,10	7.919,36	8.254,43	9.216,46	10.260,34
%	43,47	40,50	39,43	39,56	40,36
Total Permintaan					
Miliar Rupiah	18.604,52	19.553,64	20.936,89	23.299,14	25.423,77
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik selama kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuatif dengan tren menunjukkan peningkatan. Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan yang terus meningkat, maka berbagai produk barang dan jasa perlu diimpor pada tahun 2018 sekitar 40 persen barang dan jasa yang diimpor atau senilai Rp 10,26 triliun.

4.8 **NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALACE)**

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar wilayah dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada

nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2014 - 2018, posisi perdagangan barang dan jasa Kota Bitung dengan luar negeri dan antar wilayah, selalu menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kota Bitung selalu dalam posisi Surplus. Penyebab nilai posisi surplus dikarenakan dominasi nilai ekspor antar wilayah dan luar negeri yang selalu lebih besar dari nilai impor antar wilayah dan luar negeri. Nilai ekspor luar negeri lebih besar dari impor luar negeri menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai "tabungan luar negeri". Surplus perdagangan Kota Bitung selalu terjadi selama 2014 sampai 2018, dimana angka terendah di tahun 2015 yakni 2,58 triliun rupiah, dan angka tertinggi di tahun 2017 yakni 3,33 triliun rupiah. Net ekspor ini harus semakin ditingkatkan sehingga menjadikan neraca perdagangan Kota Bitung pada posisi balance atau surplus yang lebih besar.

Karena lebih dominannya nilai ekspor dibandingkan impor, maka rasio ekspor terhadap impor selalu diatas satu dari tahun 2014 - 2018, dimana angkanya berada pada kisaran 1,3.

Tabel 16. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kota Bitung, 2014-2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar rupiah)	11.042,98	10.505,84	11.271,43	12.547,04	13.549,28
Nilai Impor (ADHB) Miliar Rupiah	8.087,10	7.919,36	8.254,43	9.216,46	10.260,34
Net Ekspor (X-M) Miliar Rupiah	2.955,88	2.586,48	3.017,00	3.330,58	3.288,94
Rasio Ekspor terhadap Impor	1,37	1,33	1,37	1,36	1,32

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.9 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi.

Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 17. Incremental Capital Output Ratio Kota Bitung, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010)					
(Miliar rupiah)	8.755,30	9.064,84	9.537,54	10.127,35	10.735,90
Perubahan					
Miliar Rupiah	526,15	309,54	472,70	589,81	608,55
PMTB (ADHK 2010)					
Miliar Rupiah	2.859,38	3.128,28	3.350,48	3.606,63	3.734,29
ICOR	5,43	10,11	7,09	6,11	6,14

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR memiliki kecenderungan berfluktuasi dari 2014 hingga 2018, dimana sempat mengalami kenaikan pada pada tahun 2015 kemudian menurun ditahun 2016 dan 2017 dan sedikit naik di tahun 2018. Nilai ICOR tahun 2018 telah mencapai 6,14 yang berarti bahwa setiap penambahan 1 nilai output membutuhkan penambahan kapital sebanyak 6,14. Sehingga untuk penambahan output 1 miliar rupiah, dibutuhkan penambahan modal 6,14 miliar rupiah.

<https://bitungkota.bps.go.id>



5

PENUTUP

<https://bitungkota.bps.go.id>



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2014 s.d 2018 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Bitung pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi, sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Nominal PDRB Kota Bitung Tahun 2018 atas dasar harga berlaku mencapai 15.163,43 miliar rupiah sementara atas dasar harga konstan sebesar 10.735,90 miliar rupiah. Peranan konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah mencapai 50,08 persen dimana 38,49 persen adalah konsumsi rumah tangga. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bitung tahun 2018 sebesar 6,01 persen.
4. Peranan investasi dalam PDRB pengeluaran Kota Bitung didekati dari proporsi PMTB terhadap PDRB periode 2014-2018 berada pada kisaran 25 sampai 29 persen.
5. PDRB Kota Bitung daru dapat memenuhi 59,64 persen dari total permintaan akhir, sisanya sebesar 40,36 persen diperoleh dari impor, baik impor dari luar negeri maupun dari luar wilayah. Nilai impor selama 2014-2018 lebih kecil dibanding ekspor.
6. Dari seluruh data, indikator dan ulasan yang ditampilkan dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan, evaluasi dan berbagai analisis ekonomi lainnya. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain. Secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

<https://bitungkota.bps.go.id>

<https://bitungkota.bns.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bitung, 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.779.528,02	4.567.138,87	4.831.487,02	5.371.250,23	5.836.794,86
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	121.461,98	132.713,87	145.536,62	162.171,76	184.955,62
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	997.582,68	1.185.125,55	1.236.928,66	1.389.827,98	1.571.528,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.646.784,66	3.149.839,10	3.444.891,59	3.825.295,21	4.278.725,75
5. Perubahan Inventori	16.189,46	12.983,68	6.609,45	3.549,42	2.483,75
6. Ekspor	11.042.977,43	10.505.837,94	11.271.432,93	12.547.041,99	13.549.278,28
7. Impor	8.087.099,51	7.919.362,03	8.254.431,00	9.216.457,32	10.260.340,24
PDRB (1 s.d 7)	10.517.424,71	11.634.276,99	12.682.455,27	14.082.679,26	15.163.426,63

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bitung, 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.376.643,42	3.715.238,73	3.912.831,72	4.121.220,08	4.252.573,64
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	105.162,73	105.368,83	107.429,30	110.921,97	118.941,94
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	801.905,87	882.102,96	902.483,33	965.715,73	1.016.073,76
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.859.375,05	3.128.277,82	3.350.480,14	3.606.626,33	3.734.291,15
5. Perubahan Inventori	10.700,22	13.316,15	7.007,00	3.754,01	2.563,60
6. Ekspor	8.349.255,70	8.097.221,58	8.290.653,09	8.532.808,81	9.230.185,40
7. Impor	6.747.738,31	6.876.683,73	7.033.339,73	7.213.693,83	7.618.725,25
PDRB (1 s.d 7)	8.755.305	9.064.842,35	9.537.544,85	10.127.353,10	10.735.904,24

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bitung, 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	35,94	39,26	38,10	38,14	38,49
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,15	1,14	1,15	1,15	1,22
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,49	10,19	9,75	9,87	10,36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,17	27,07	27,16	27,16	28,22
5. Perubahan Inventori	0,15	0,11	0,05	0,03	0,02
6. Ekspor	105,00	90,30	88,87	89,10	89,35
7. Impor	76,89	68,07	65,09	65,45	67,67
PDRB (1 s.d 7)	100	100	100	100	100

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bitung 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,85	10,03	5,32	5,33	3,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,32	0,20	1,96	3,25	7,23
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,10	10,00	2,31	7,01	5,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,42	9,40	7,10	7,65	3,54
6. Ekspor	-2,60	-3,02	2,39	2,92	8,17
7. Impor	-7,01	1,91	2,28	2,56	5,61
PDRB (1 s.d 7)	6,39	3,54	5,21	6,18	6,01

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kota Bitung, 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	111,93	122,93	123,48	130,33	137,25
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	115,50	125,95	135,47	146,20	155,50
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	124,40	134,35	137,06	143,92	154,67
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	92,57	100,69	102,82	106,06	114,58
6. Ekspor	132,26	129,75	135,95	147,04	146,79
7. Impor	119,85	115,16	117,36	127,76	134,67
PDRB (1 s.d 7)	120,13	128,35	132,97	139,06	141,24

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kota Bitung, 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,78	9,83	0,45	5,55	5,31
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	7,79	9,05	7,56	7,92	6,36
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,32	8,00	2,01	5,00	7,47
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,30	8,78	2,11	3,16	8,03
6. Ekspor	9,70	-1,90	4,78	8,16	-0,17
7. Impor	8,08	-3,91	1,91	8,86	5,41
PDRB (1 s.d 7)	5,38	6,84	3,61	4,57	1,57

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

<https://bitungkota.bps.go.id>



DAFTAR PUSTAKA

<https://bitungkompos.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____ *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

<https://bitungkota.bps.go.id>

